



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

1. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, naskah dinas digunakan sebagai sarana utama komunikasi kedinasan. Melalui naskah dinas, berbagai arahan, keputusan, penugasan, dan koordinasi antarunit kerja disampaikan secara resmi sehingga diperlukan pengaturan yang menjamin ketertiban, keseragaman, dan kejelasan administrasi. Seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian serta perkembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengaturan tata naskah dinas perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa pedoman yang mutakhir, penyusunan dan pengelolaan naskah dinas berpotensi tidak seragam dan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi kedinasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemenko Infra sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas yang tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Memberikan pedoman penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kemenko Infra.
- Menyeragamkan jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas.
- Menjamin ketertiban dan keabsahan naskah dinas sebagai dokumen kedinasan.
- Mendukung kelancaran komunikasi kedinasan secara tertulis.
- Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas;
- tata cara pembuatan naskah dinas;
- pengamanan naskah dinas;
- kewenangan penandatanganan naskah dinas; dan
- pengendalian naskah dinas.

4. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Infra dalam penyelenggaraan tata naskah dinas guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

5. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas, diharapkan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kemenko Infra dapat dilaksanakan secara seragam dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.